



Media: Republika

Hari: Kamis

Tanggal: 28 Maret 2019

Halaman: 4

Penutupan TPST Piyungan

Mulai Berdampak

● OLEH SILVY DIAN SETIAWAN

Penutupan akses ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Bantul, Yogyakarta, sejak Ahad [24/3] lalu hingga kini mulai menimbulkan dampak. Meski demikian, warga Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul, yang terdampak tetap enggan membuka akses sebelum tuntutannya terpenuhi. Padahal, hingga saat ini lautan sampah di Sleman dan Bantul masih terbengkalai.

Ketua Komunitas Pemulung Piyungan Maryono mengatakan, aksi penutupan tersebut memang berdampak bagi warga di sekitar TPST Piyungan. Pasalnya, hampir seluruh penduduk memiliki mata pencaharian sebagai pemulung atau pengepul. "Semua pemulung dan pengepul terdampak, sapi-sapi juga kelaparan," ujar Maryono kepada *Republika*, Rabu [27/3]. Saat ini, terdapat lima Rukun Tetangga (RT) dengan total kurang lebih 500 kepala keluarga (KK) yang terdampak penutupan akses. Dari lima RT tersebut, 70 persen warga bergantung hidup di TPST Piyungan. Maryono mengungkapkan, meski penghasilan warga berkurang, penutupan tetap dilakukan agar pemerintah bisa membenahi TPST Piyungan. Penutupan akses ke TPST Piyungan dilakukan bukan tanpa alasan. Penutupan tersebut menjadi jalan akhir bagi warga karena tuntutannya belum juga dipenuhi oleh pemerintah setempat. Warga Dusun Ngablak meminta pemerintah segera membenahi TPST Piyungan karena sudah melebihi kapasitas.

"Dermaga yang di atas untuk pembuangan sudah sempit, bahkan tidak bisa lagi untuk pembuangan," kata Maryono. "Selain itu, jalan menuju tempat pembuangan juga bertubang dan berlumpur sehingga antrian truk untuk membuang sampah pun mencapai kurang lebih 1,5 kilometer." Maryono menjelaskan, TPST sudah melampaui kapasitas sehingga berimbas pada jalan dan operasional truk pembuangan sampah. Dulu, satu truk biasanya dapat membuang sampah hingga tiga kali trip. Namun, saat ini hanya bisa satu kali saja.

Kondisi tersebut terjadi akibat dari antrian yang harus menunggu delapan hingga 9 jam hanya untuk membuang satu truk sampah. Maryono mengungkapkan, dampak yang ditimbulkan TPST Piyungan tidak hanya sebatas dari aksi penutupan. Keberadaan TPST juga dinilai membawa dampak buruk bagi warga di sekitarnya. Pasalnya, akses jalan menuju TPST bertubang dan berlumpur. "Kalau anak masuk sekolah, mau kuliah, mau kerja, kakinya harus diberi alas plastik kresek kalau melewati jalan itu," jelasnya.

Sementara itu, untuk pembenahan, warga meminta 400 truk urukan tanah. "Kalau sudah ready nanti truk bisa masuk dan tidak ada lagi antrian masuk lagi," kata Maryono. Menurut Maryono, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY juga telah datang ke lokasi untuk melihat langsung kondisi TPST tersebut. Bahkan, 800 truk urukan tanah akan diberikan untuk pembenahan sementara TPST Piyungan dengan luas mencapai 14,5 hektare. Maryono menyebutkan,

pembenahan dengan tanah uruk tersebut hanya untuk sementara waktu. Apabila pembenahan dilakukan dengan pembangunan talud secara permanen, tentu membutuhkan waktu lama. Penutupan yang berlangsung empat hari ini sudah mengakibatkan banyak pihak yang terdampak. "Kita juga cari jalan tengahnya sehingga tidak menjadi lautan sampah dan warga bisa *mulung* lagi," ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Suyana mengatakan, pihaknya tidak bisa membuang sampah akibat adanya penutupan ini. Saat ini, sampah menumpuk di seluruh tempat pembuangan sementara (TPS) yang ada di Kota Yogyakarta. "Kami tidak bisa membuang dan ada penumpukan di TPS kita, berapa sampah kita belum bisa pastikan karena nanti dilimbangnya di Piyungan," kata Suyana kepada *Republika*, Rabu [27/3]. Suyana menjelaskan, saat ini terdapat 142 TPS yang tersebar di seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Yogyakarta. DLH juga memiliki 40 truk untuk melakukan pengangkutan sampah. Menurut Suyana, pengelolaan TPST Piyungan tersebut berada di tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Untuk itu, ia pun mendesak Pemprov segera mencari solusi terhadap masalah ini.

"Kami mendesak untuk segera dibuka, kami membuang ke sana juga tidak gratis, ada kompensasi yang kita bayarkan ke Pemprov, satu tahun Rp 2,3 miliar," kata Suyana. Suyana mendesak TPST tersebut dapat dibuka secepatnya. Dengan begitu, tidak terjadi lagi penumpukan sampah di Kota Yogyakarta.

Suyana juga mengajak warga untuk mengencarkan pengelolaan dan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga sehingga mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke TPST Piyungan. "Tidak beroperasinya TPST Piyungan dalam beberapa hari terakhir ini harus dijadikan *warning* bagi warga untuk ikut peduli atas sampah yang mereka hasilkan, warga bisa memulainya dari rumah tangga dengan memilah dan mengolah sampah," kata Suyana.

■ ed: nora 9222ah

Tindak Lanjut
Untuk Ditanggapi
Untuk Diketahui
Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005